INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Daya Beli di Persimpangan: Antara Inflasi, Upah, dan Tekanan Rumah Tangga

Brief Update - **Oktober 2026**

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Monitoring Issue of Macroeconomics & Finance

Daya Beli di Persimpangan: Antara Inflasi, Upah, dan Tekanan Rumah Tangga

M. Rizal Taufikurahman
Head of Center

Riza Annisa Pujarama
Researcher

Sia Nawir
Researcher

Salsabila Azkia Farhani
Researcher

Zulianissa Diah Kusmawati
Research Assistant

Eko Listiyanto
Director of Big Data Development

Abdul Manap Pulungan
Researcher

M. Syamil Iklil Abd Barr
Researcher

Noval Fauzan
Research Assistant

Pramudya Putra Bintang
Research Assistant

Center of Macroeconomics and Finance (MacFin)

INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Indonesia menghadapi tekanan dari kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan komoditas global, serta tantangan daya beli rumah tangga. Rupiah kembali melemah hingga sekitar Rp18.020 per dolar AS pada 15 Oktober 2026, meningkatkan risiko kenaikan imported inflation. Tekanan ini berpotensi merambat ke biaya energi, bahan baku industri, pangan, pupuk, dan distribusi barang, sehingga memperbesar risiko kenaikan harga domestik.

Di tengah tekanan biaya tersebut, daya beli masyarakat menunjukkan sejumlah tanda kerentanan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%. Pelemahan penjualan ritel, perlambatan kredit konsumsi, dan penurunan saldo rata-rata rekening kecil mengindikasikan semakin terbatasnya ruang belanja sebagian rumah tangga. Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah pengangguran masih berada di sekitar 7,2 juta orang dan hampir enam dari sepuluh pekerja berada di sektor informal, sehingga ketahanan pendapatan masyarakat masih menjadi tantangan.

Tekanan biaya juga berpotensi diteruskan dari produsen kepada konsumen. Pada September 2026, inflasi harga perdagangan besar (IHPB) mencapai 6,76% secara tahunan, lebih tinggi daripada inflasi indeks harga konsumen (IHK) sebesar 3,28%, sementara inflasi pangan tercatat 5,03%. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan biaya di tingkat hulu belum sepenuhnya tercermin pada harga konsumen. Apabila tekanan nilai tukar dan harga energi berlanjut, risiko kenaikan harga pada bulan-bulan berikutnya perlu diwaspadai karena dapat semakin menggerus daya beli masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, APBN berperan sebagai *shock absorber* melalui subsidi energi, bantuan sosial, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Namun, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang telah mencapai 84,3% dari pagu hingga September 2026 serta realisasi bansos sebesar Rp115,8 triliun atau 71,2% dari pagu menunjukkan pentingnya memastikan efektivitas belanja. Kebijakan fiskal perlu diarahkan pada penguatan pengawasan subsidi, evaluasi ketepatan sasaran dan kecukupan manfaat bansos serta BSU, dan pemantauan rambatan biaya produksi ke harga konsumen. Dalam jangka menengah, perlindungan sosial juga perlu diperkuat agar mampu menjangkau rumah tangga rentan, termasuk sebagian kelas menengah, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Update Moneter dan Keuangan

Rupiah Kembali Tertekan di Level Rp18.000, Beban Biaya Impor Berpotensi Ikut Naik

Rata-Rata Nilai Kurs Rupiah terhadap Dolar USD dan Pertumbuhannya

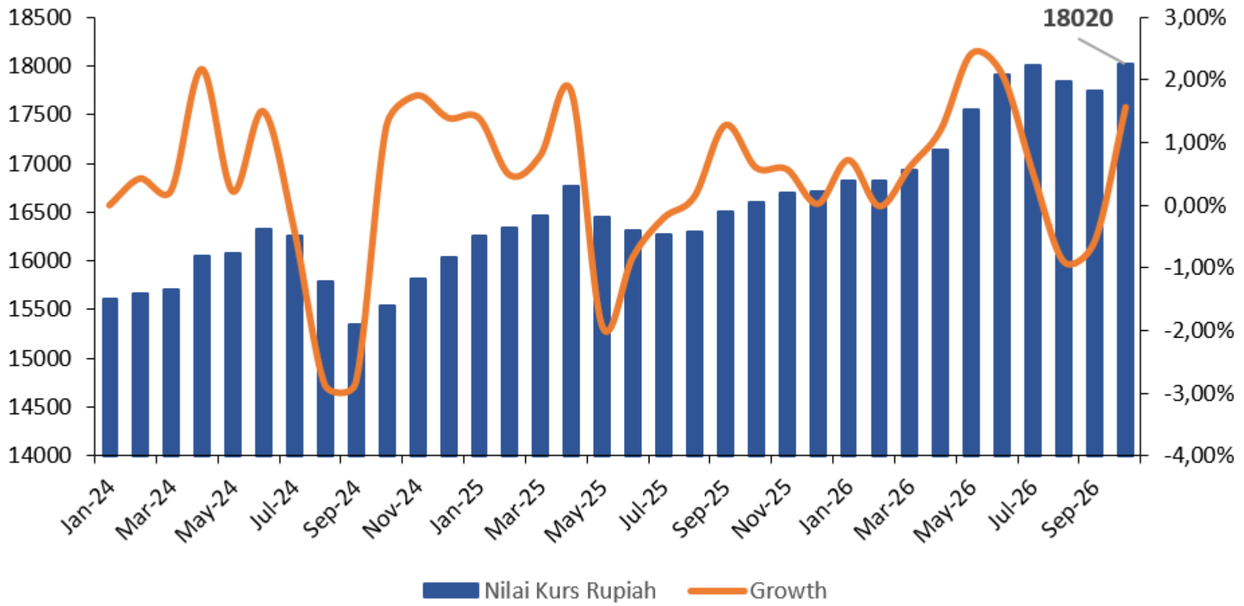

Indonesia Import Value (USD mn)

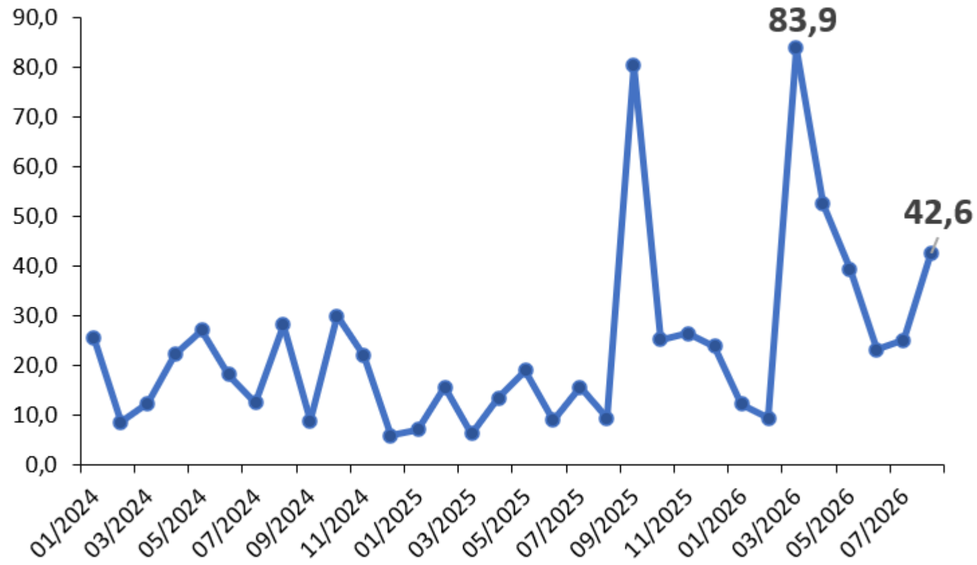

- Rata-rata kurs rupiah September 2026 berada di sekitar Rp17.741,7 per dolar AS, menguat tipis dibandingkan Agustus 2026. Namun, rupiah kembali melemah ke level Rp18.020 per dolar AS pada 15 Oktober 2026, mendekati puncak Juni-Juli 2026 (±Rp18.000). Penguatan pada September terbukti belum berlanjut, sehingga level kurs tinggi berpotensi bertahan sebagai biaya dasar baru bagi pembayaran dalam dolar.
- Nilai impor naik ke USD 42,6 juta pada Agustus 2026, sekitar 69% lebih tinggi dibandingkan Juli (USD 25,2 juta), setelah turun dari puncak Maret 2026 (USD 83,9 juta). Pada kurs rata-rata September (Rp17.741,7), impor sebesar itu setara sekitar Rp756 miliar. Dengan rupiah yang kembali melemah ke Rp18.020 per dolar AS pada 15 Oktober 2026, nilainya menjadi sekitar Rp768 miliar, bertambah sekitar Rp12 miliar tanpa ada kenaikan volume. Artinya pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan ini memperbesar beban biaya impor.

Sumber: FRED dan CEIC, 2026 (diolah)

Harga Minyak Bergejolak, Impor Energi Jadi Titik Rentan

Indonesia Imports By Category (2025) (Miliar USD)

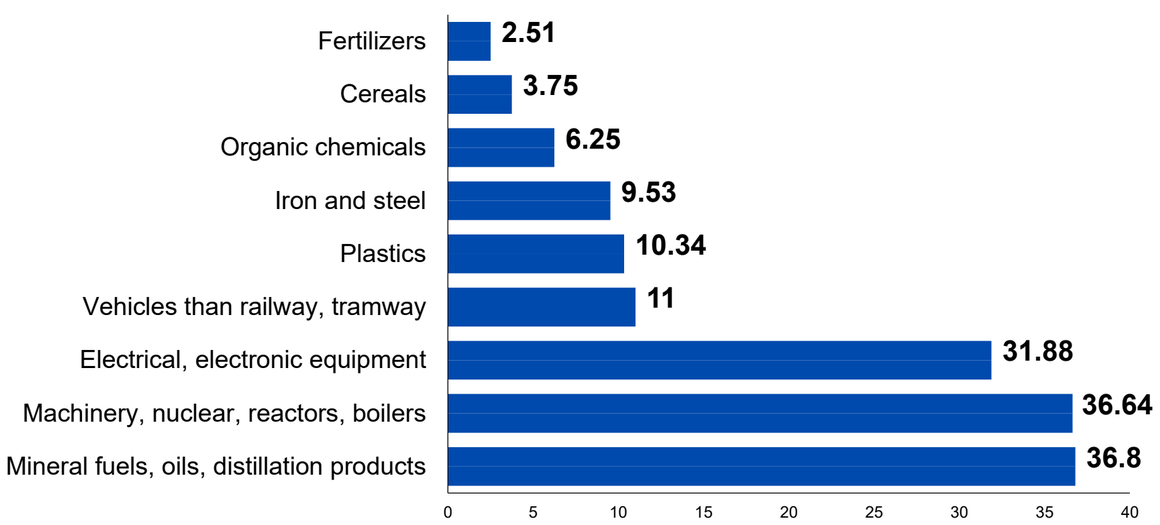

Crude Oil Brent Price (Dollar per Barrel)

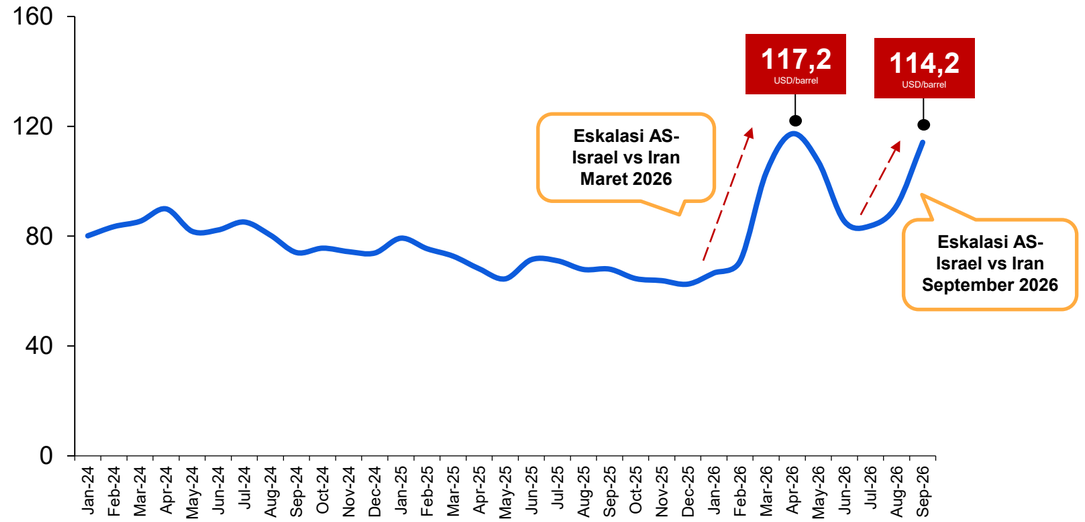

- Pada 2025, bahan bakar mineral dan produk turunan minyak menjadi kategori impor terbesar Indonesia dengan nilai USD 36,8 miliar, tipis di atas mesin dan peralatan mekanik (USD 36,64 miliar) dan peralatan elektronik (USD 31,88 miliar). Sementara impor pangan dan pertanian jauh lebih kecil, yaitu serealia USD 3,75 miliar dan pupuk USD 2,51 miliar.
- Pergerakan harga minyak sangat menentukan biaya impor Indonesia, mengingat energi merupakan komponen impor terbesar. Harga Brent melonjak dari sekitar USD 63 per barel pada akhir 2025 ke USD 117,2 saat eskalasi AS-Israel vs Iran pada Maret 2026, sempat turun, lalu naik lagi ke USD 114,2 pada eskalasi September 2026. Dengan rupiah yang juga melemah ke Rp18.020, kenaikan harga minyak ini berisiko mendorong biaya energi dan BBM. Dampak kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah tidak berhenti di sektor energi, tetapi juga merembet ke pupuk dan beras yang sangat bergantung pada biaya energi dan impor dalam dolar.

Sumber: Trading Economics dan CEIC, 2026 (diolah)

Harga Minyak di Atas Asumsi APBN, BBM Nonsubsidi Ikut Naik

Harga Rata-Rata ICP Indonesia (USD per Barrel) dan Selisih dengan Asumsi Harga APBN US$70

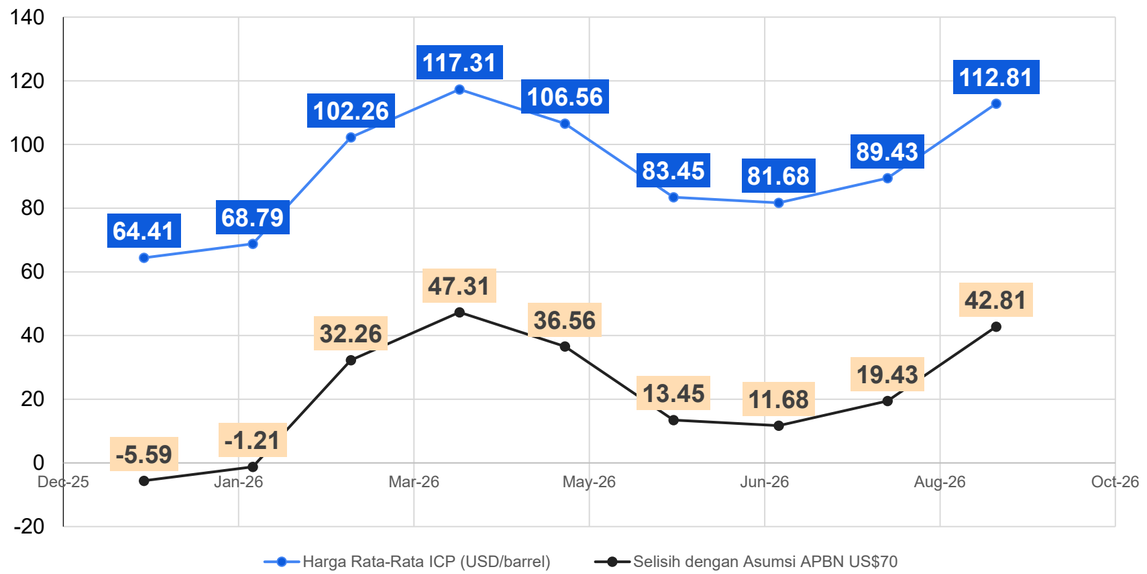

- Harga rata-rata ICP Indonesia pada Januari-September 2026 mencapai USD 91,86 per barel, atau USD 21,86 di atas asumsi APBN sebesar USD 70. Pada Januari-Februari, ICP masih di bawah asumsi (USD 64,41 dan USD 68,79), lalu melonjak sejak Maret hingga puncak USD 117,31 pada April 2026. Harga sempat turun ke USD 81,68 pada Juli, tetapi kembali naik ke USD 112,81 pada September 2026, atau USD 42,81 di atas asumsi APBN. Selisih ini berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi pada APBN, terutama untuk BBM bersubsidi, apalagi dengan rupiah yang juga melemah.

Kenaikan BBM Nonsubsidi September 2026

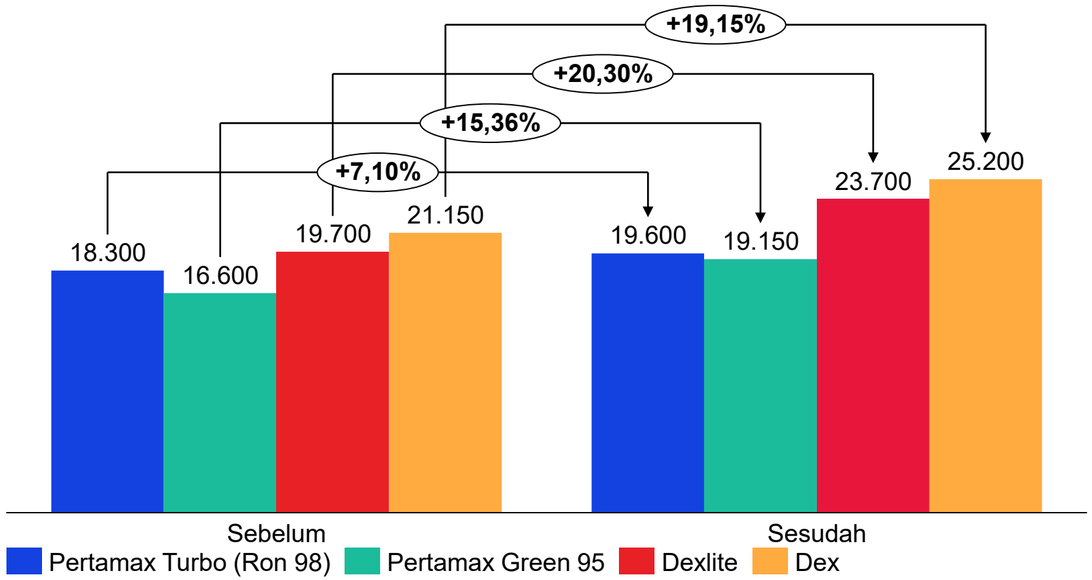

- Tekanan harga minyak tersebut mulai diteruskan ke konsumen melalui kenaikan BBM nonsubsidi pada September 2026. Kenaikan terbesar terjadi pada Dexlite (+20,30%, dari Rp19.700 ke Rp23.700) dan Dex (+19,15%, dari Rp21.150 ke Rp25.200), diikuti Pertamax Green 95 (+15,36%, dari Rp16.600 ke Rp19.150) dan Pertamax Turbo RON 98 (+7,10%, dari Rp18.300 ke Rp19.600). Kenaikan solar nonsubsidi yang lebih tajam berpotensi menambah biaya logistik dan distribusi, termasuk untuk bahan pangan.

Sumber: Kementerian ESDM and CNBC, 2026 (diolah)

Harga Pangan Bergerak Naik, Biaya Logistik Perlu Diwaspadai

Global Commodity Price Index (Food Price, Cereals, Sugar, Meat, and Vegetabel Oils)

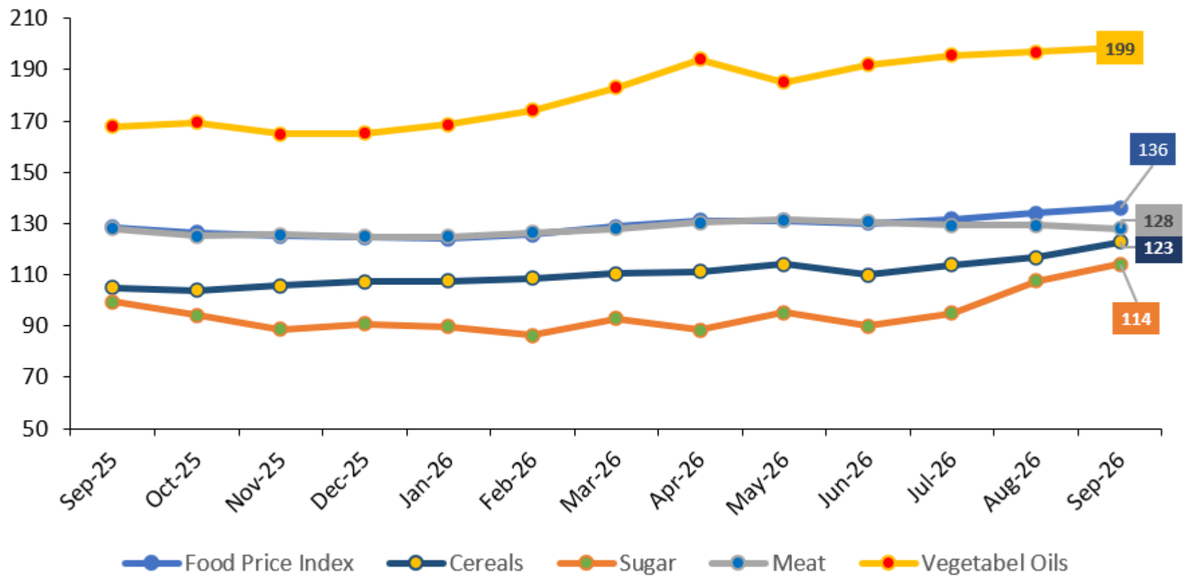

Pergerakan Harga Komoditas (Beras, Gula, Daging Ayam, Minyak Goreng)

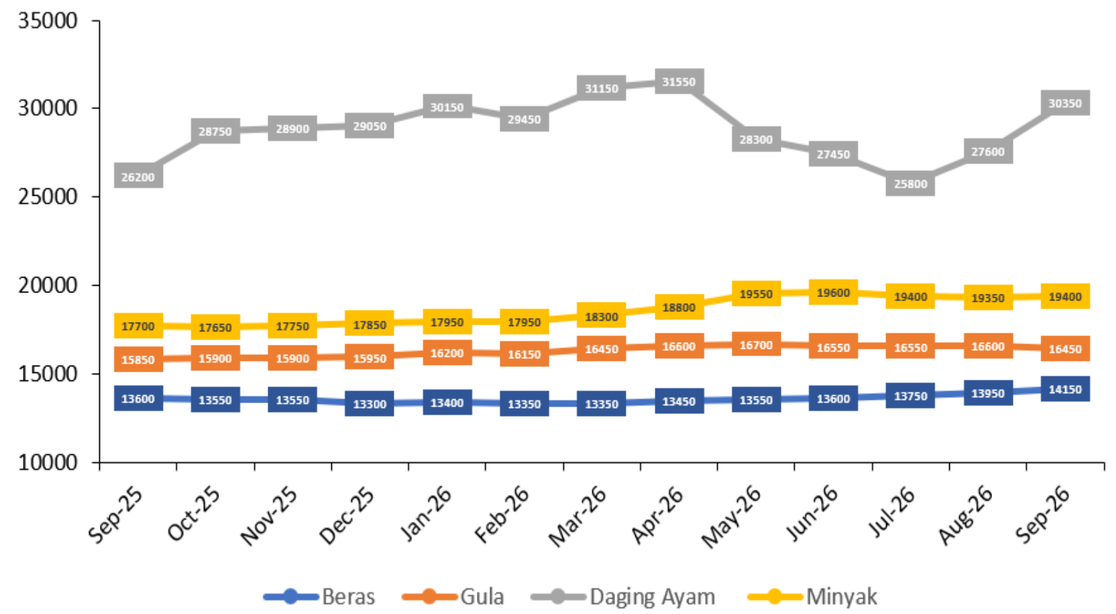

- Secara global, indeks harga pangan September 2026 mencapai 136, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hampir semua komponen naik bertahap, terutama minyak nabati (199), sementara indeks daging (128) cenderung menurun sejak Mei. Artinya, tekanan inflasi pangan sudah terbentuk sebelum kenaikan BBM nonsubsidi terasa di dalam negeri.
- Seiring itu, harga pangan domestik bergerak serupa: beras, gula, daging ayam, dan minyak goreng berada di atas level periode yang sama tahun sebelumnya. Daging ayam paling fluktuatif, memuncak sekitar Rp31.550/kg pada April, turun ke sekitar Rp25.800 pada Juli, lalu naik lagi ke sekitar Rp30.350 pada September. Ini menunjukkan tekanan global mulai tertransmisikan ke konsumen, dan kenaikan solar nonsubsidi berpotensi memperkuatnya lewat biaya logistik.

Sumber: FAO dan BI, 2026 (diolah)

Risiko *Imported Inflation:* Dolar Mahal, Semua Ikut Mahal

Kurs JISDOR dan Harga Minyak Brent, Jan 2024 – Sep 2026

Rata-rata bulanan. Asumsi APBN 2026: kurs Rp16.500/US$ dan ICP US$70/barel. JISDOR 19 Okt 2026: Rp18.050

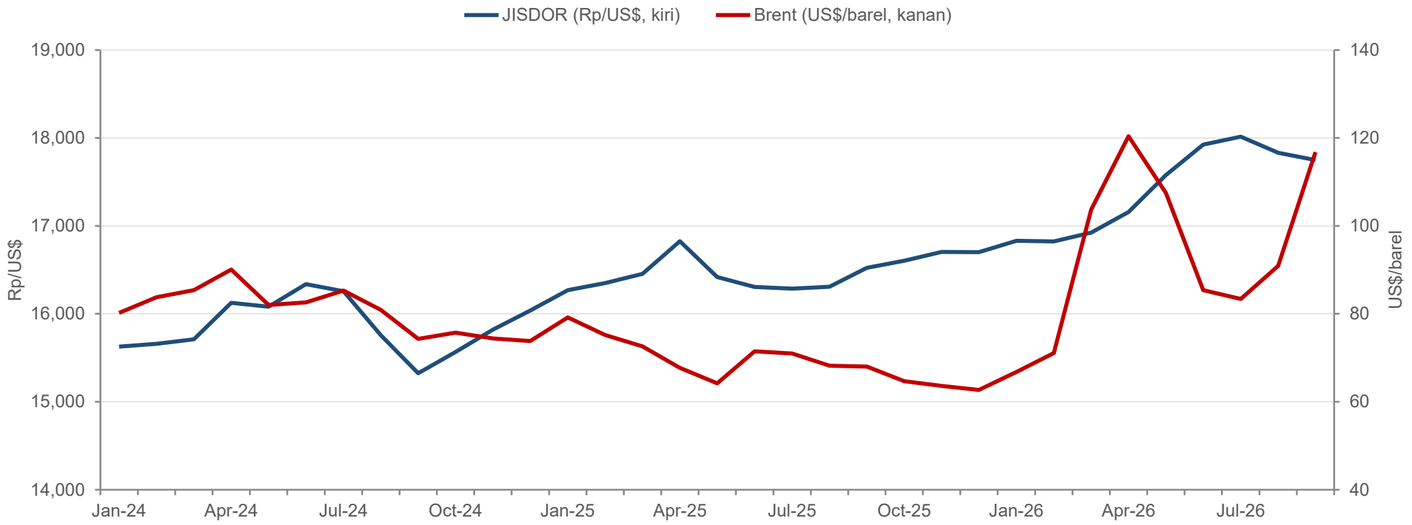

Kenaikan Harga Komoditas Impor dalam Rupiah, Sep 2025 – Jul 2026

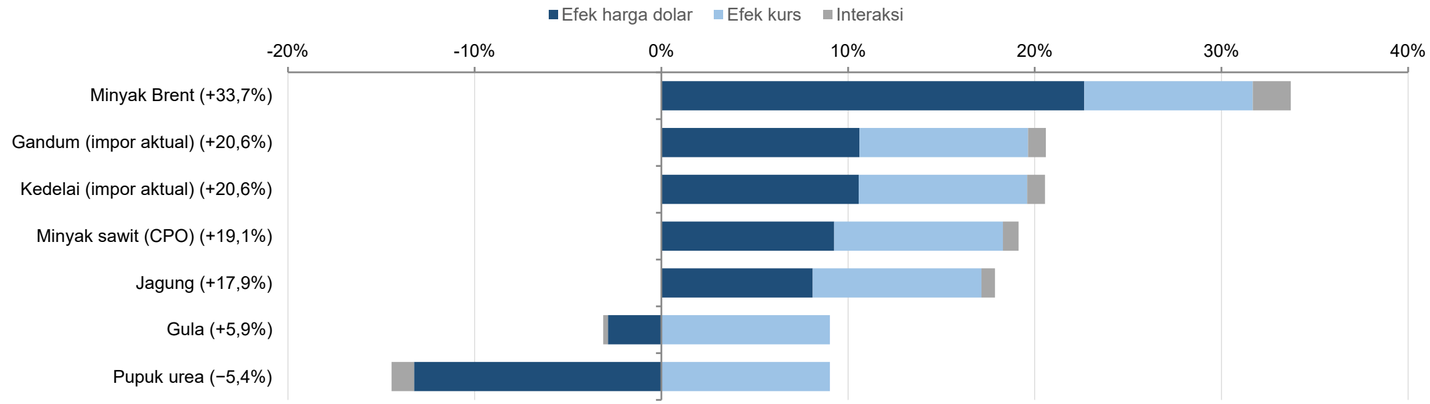

- Kurs JISDOR naik 7,4% yoy menjadi Rp17.749 per dolar AS pada September 2026, meski BI-Rate sudah dinaikkan 100 bps. Di saat yang sama, Brent melonjak dua kali, ke US$120,4 pada April dan US$116,8 pada September. Akibatnya, ICP September setara Rp2,00 juta per barel, atau 73% di atas asumsi APBN 2026. Selama harga BBM bersubsidi ditahan, selisih ini berpotensi berpindah ke APBN.

- Dampak kenaikan kurs tidak berhenti pada minyak, tetapi merambat ke hampir semua komoditas impor. Sepanjang September 2025–Juli 2026, kurs naik 9,0% sehingga menambah sekitar 9 poin persen pada harga rupiah setiap komoditas. Tambahan ini hampir setara dengan kenaikan harga dolar gandum, kedelai, CPO, dan jagung itu sendiri. Bahkan gula, yang harga dolarnya turun 2,9%, justru naik 5,9% dalam rupiah.

- Meski demikian, harga yang benar-benar dibayar Indonesia untuk gandum dan kedelai naik lebih rendah, yakni sekitar 20,6% dalam rupiah. Untuk gandum, angka ini kira-kira separuh dari kenaikan patokan gandum AS (44,6%), karena pasokan gandum Indonesia sebagian besar berasal dari Australia, Argentina, dan Kanada. Artinya, tekanan biaya pangan impor tetap nyata, meski tidak sebesar yang tersirat dari harga dunia.

Sumber: BI (2026), JISDOR & BI-Rate; World Bank (2026), ESDM (2026); UN Comtrade (2026), diolah

Risiko *Imported Inflation*: Bom Waktu di Harga Pangan Impor

Kenaikan Biaya Impor vs Harga Eceran

Barang	Biaya di hulu (Rp)	Harga di konsumen
Gula pasir	+25,8% (Sep–Sep)	+3,6%
Minyak goreng	+22,2% (Sep–Sep)	+7,2%
Terigu	+20,59% (Sep–Jul)	+0,6%
Kedelai	+20,55% (Sep–Jul)	−1,5%

Perubahan Harga Eceran Pangan Impor menurut Wilayah, Sep 2025 – Sep 2026

Persen, yoy; rata-rata sederhana antarprovinsi (SP2KP Kemendag)

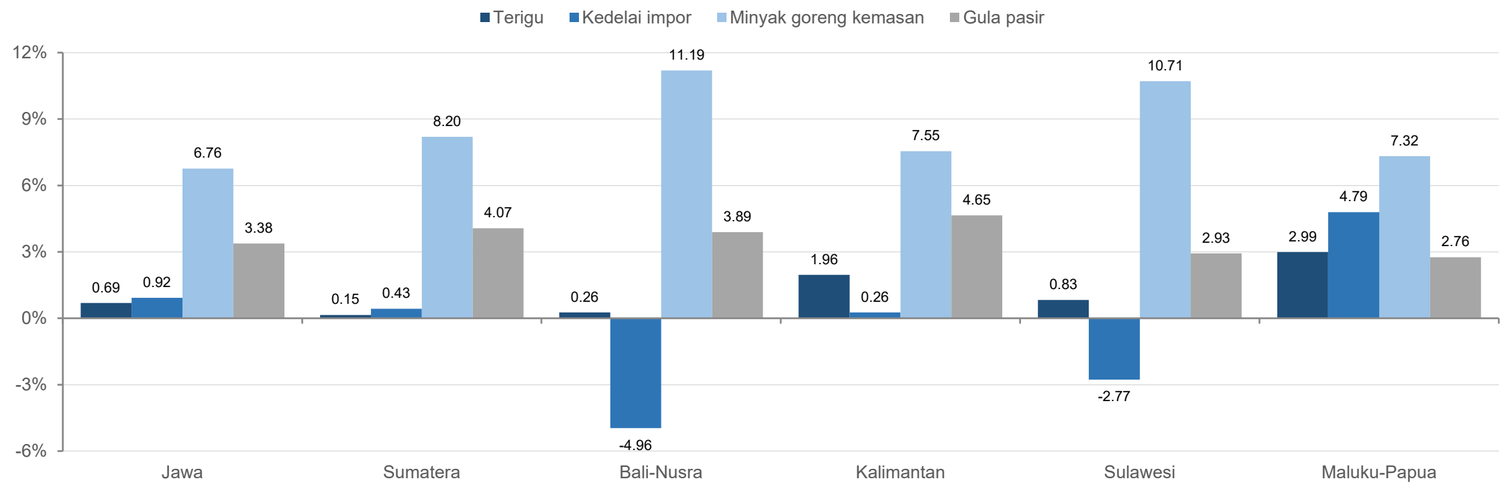

- Dari empat komoditas, hanya minyak goreng yang kenaikan biayanya sudah jelas sampai ke konsumen. Harga CPO dalam rupiah naik 22,2%, dan harga eceran minyak goreng kemasan ikut naik 7,2%. Kenaikan ini juga merata di semua wilayah, tertinggi di Bali–Nusra (11,2%) dan Sulawesi (10,7%), serta terendah di Jawa (6,8%).

- Sebaliknya, kenaikan biaya impor terigu dan kedelai sekitar 20,6% belum diteruskan ke konsumen. Harga eceran terigu hanya naik 0,6%, sedangkan kedelai impor justru turun 1,5%. Untuk kedelai, pemerintah menahan harga melalui Harga Acuan Penjualan, maksimal Rp11.500/kg di tingkat importir, dengan ancaman pencabutan izin impor. Akibatnya, kenaikan biaya lebih banyak ditanggung rantai pasok dan berisiko diteruskan ke konsumen bila tekanan berlanjut.

- Tekanan yang tertunda ini sudah mulai terasa di Indonesia timur. Di Maluku–Papua, harga terigu naik 3,0% dan kedelai impor 4,8%, jauh di atas Jawa yang keduanya masih di bawah 1%. Di sisi lain, Bali–Nusra dan Sulawesi justru mencatat penurunan harga kedelai impor (−5,0% dan −2,8%), sehingga dampaknya belum merata antarwilayah.

Sumber: Kemendag (2026), SP2KP; UN Comtrade (2026); World Bank (2026). BI (2026), JISDOR; Bapanas (2026), diolah

Konsumsi Rumah Tangga Tertinggal dari PDB Lima Kuartal Beruntun, Porsi Enam dari Tujuh Sub Sektor Menyusut

Pertumbuhan Ekonomi dan Kosumsi Rumah Tangga (YoY)

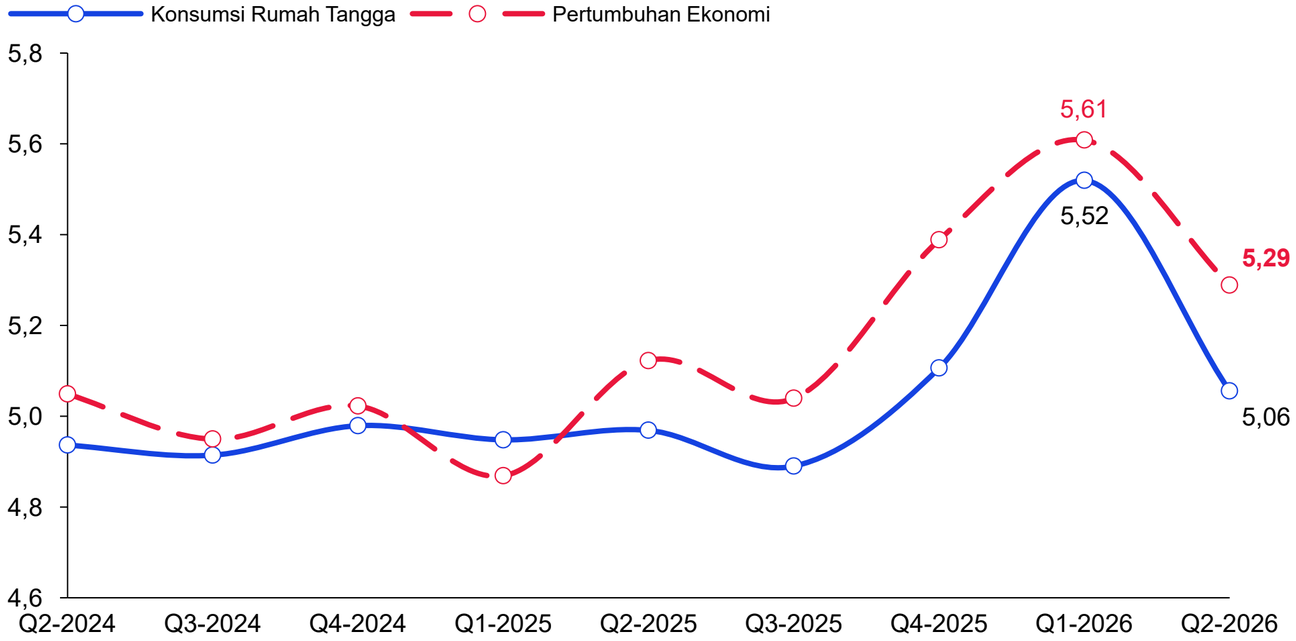

Porsi Sub Sektor Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDB (Persen)

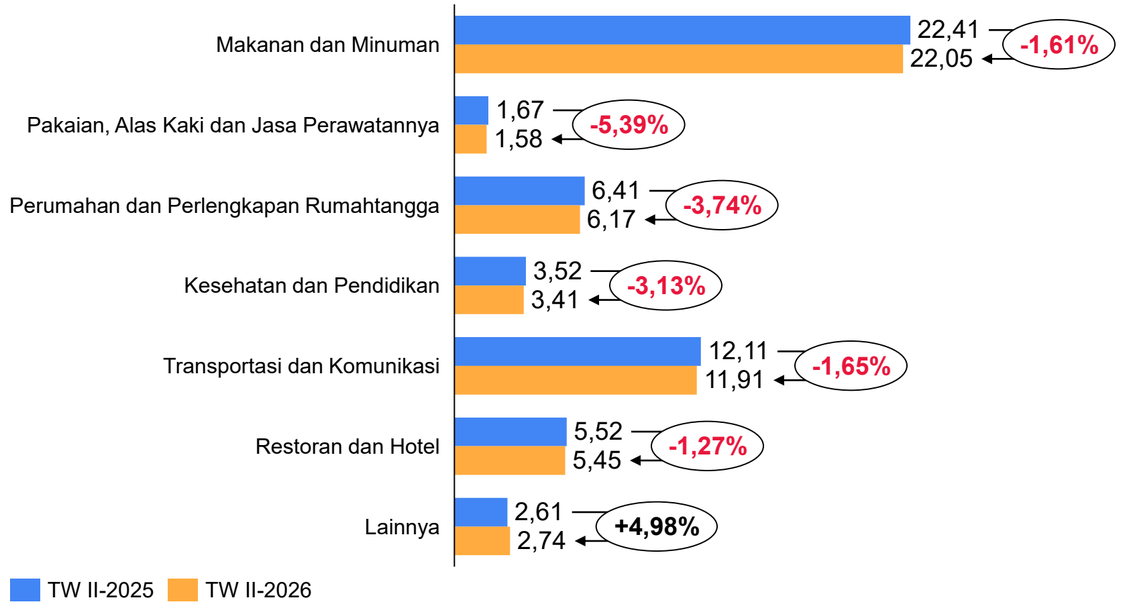

- Konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,06% (YoY) pada Q2-2026, tetapi koreksinya dari puncak Q1-2026 (sekitar 0,4 poin persentase) lebih dalam dibanding pertumbuhan ekonomi (5,29%). Konsumsi pun tertinggal dari PDB lima kuartal berturut-turut, dengan selisih melebar menjadi 0,23 poin persentase.
- Perlambatan ini terlihat pada porsi konsumsi terhadap PDB yang turun dari 54,25% menjadi 53,31%, dengan enam dari tujuh sub sektor menyusut. Penurunan terdalam terjadi pada pakaian (-5,39%), perumahan dan perlengkapan rumah tangga (-3,74%), serta kesehatan dan pendidikan (-3,13%), yang mengindikasikan penyesuaian belanja mulai menyentuh kebutuhan dasar.
- Koreksi terbesar justru datang dari kelompok berbobot besar, yakni makanan dan minuman serta transportasi dan komunikasi, yang menyumbang sekitar 60% dari penurunan porsi 0,93 poin.

Sumber: BPS (2026)

Devil's Advocate: Daya Beli Masyarakat Benar Melemah, Ritel Tak Kunjung Pulih dan Kredit Konsumsi Kehilangan Penopang

Pertumbuhan Penjualan Ritel 2026 (%MoM)

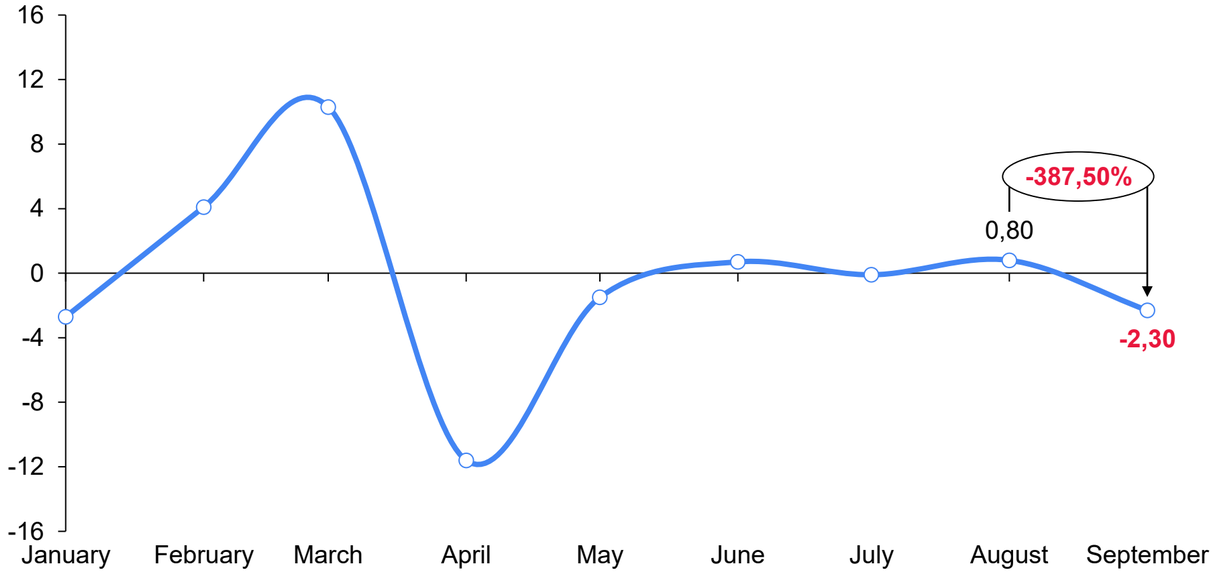

Indeks Kredit Konsumsi Triwulan 2024 - 2026

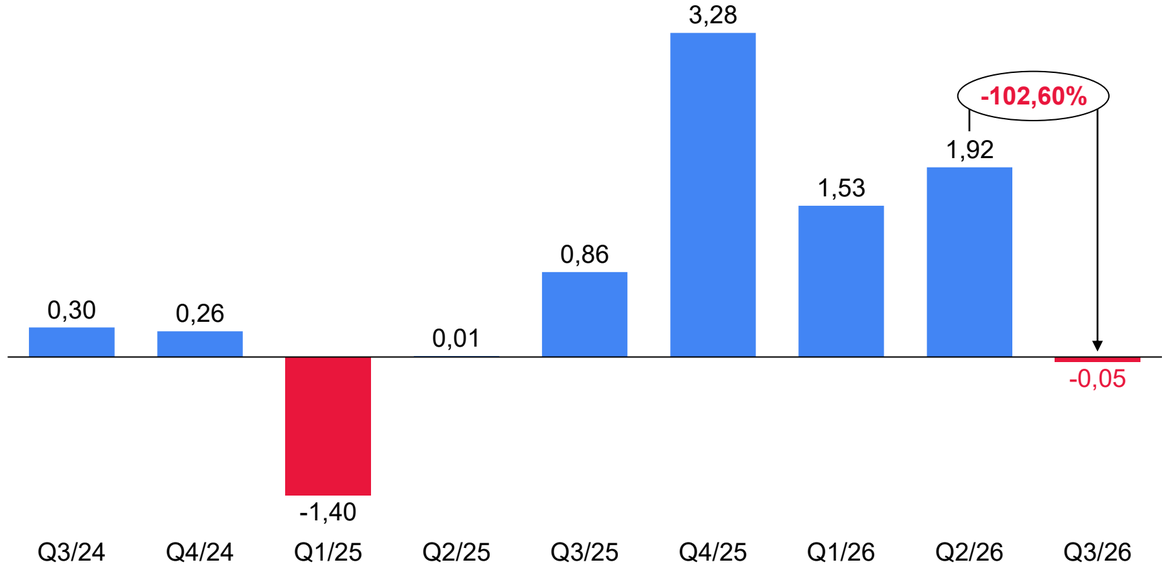

- Penjualan ritel nyaris tidak pulih sejak April, mengindikasikan permintaan kehilangan tenaga, bukan sekadar berpindah kanal. Setelah lonjakan musiman Maret dan koreksi lebih dari 11% di April, pertumbuhan bulanan Mei–Agustus datar di kisaran sekitar -1% hingga +1%. Ditambah lagi, BI memprakirakan kontraksi 2,30% pada September. Pola pada tren ini menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak kembali berbelanja seperti biasa selepas puncak belanja Lebaran: pengeluaran dilakukan seperlunya, dan bahkan kebutuhan harian seperti makanan dan minuman ikut tertekan.
- Kredit konsumsi ikut menunjukkan bantalan pembiayaan rumah tangga yang menipis. Indeksnya turun dari puncak 3,28 (Q4/25) ke 1,92 (Q2/26), lalu masuk zona negatif di -0,05 pada Q3/26, pertama kalinya sejak Q1/25.
- Tekanan ini tampak menyeluruh dan bukan sekadar perpindahan pos belanja. Bila konsumsi hanya berganti saluran, pelemahan ritel semestinya terimbangi oleh sektor lain. Akan tetapi, porsi restoran dan hotel serta transportasi dan komunikasi pada slide sebelumnya justru ikut menyusut. Ritel dan kredit konsumsi yang melemah bersamaan mengindikasikan kapasitas belanja rumah tangga yang tertekan secara agregat.

Sumber: Bank Indonesia (2026)

Devil's Advocate: Saldo Terus Menipis, Daya Beli Kian Terkikis

Rata-Rata Saldo per Rekening, Kelompok Nominal ≤ Rp100 Juta (Juta Rupiah)

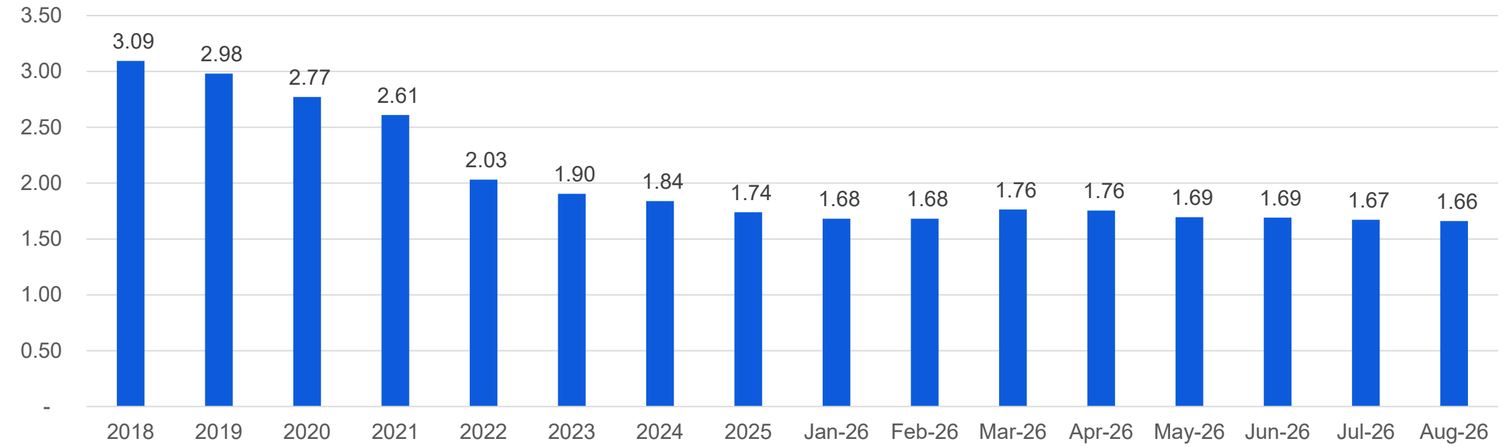

Pertumbuhan Rata-Rata Saldo per Rekening, Kelompok Nominal ≤ Rp100 Juta (YoY)

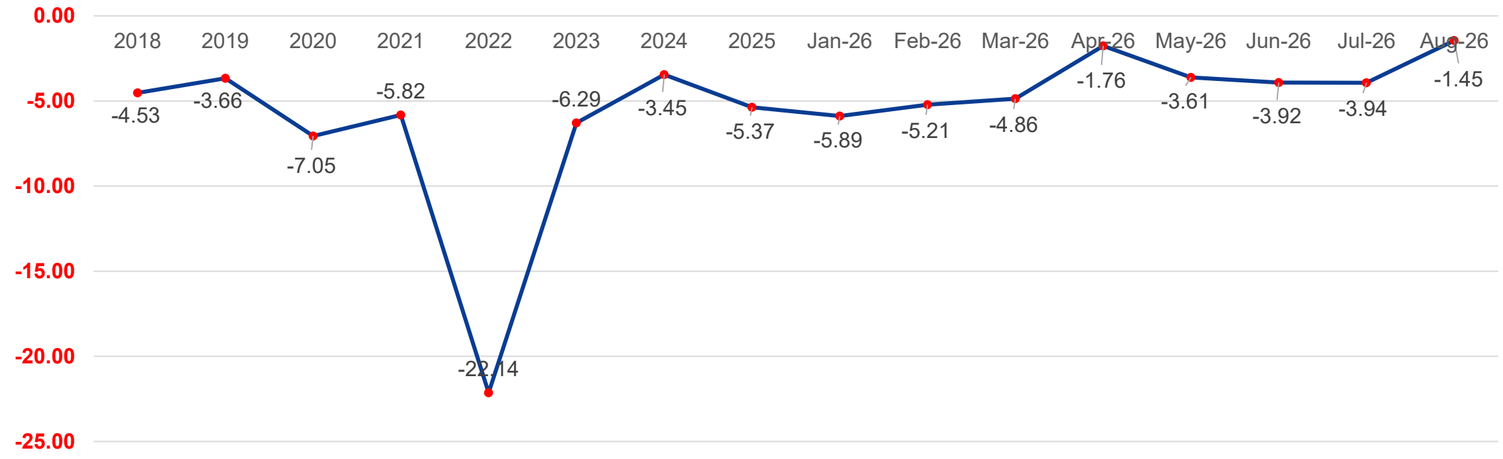

- Saldo rata-rata rekening kecil turun dari sekitar Rp3,09 juta pada 2018 menjadi Rp1,74 juta pada 2025, dengan kontraksi tahunan yang umumnya berkisar 3% sampai 7%. Penurunan yang berulang selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa tabungan rumah tangga berpenghasilan rendah kian tergerus dan simpanan yang dulu cukup menutup kebutuhan beberapa pekan, kini lebih cepat habis oleh satu kali biaya berobat atau uang masuk sekolah.
- Tekanan berlanjut sepanjang 2026, dan Agustus 2026 dengan catatan Rp1,66 juta menjadi bulan dengan rata-rata saldo paling rendah sepanjang periode amatan, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun ketika pandemi terjadi. Kontraksi yang lebih ringan pada April dan Agustus lebih mencerminkan basis tahun lalu yang sudah rendah, sebab Agustus 2025 sendiri turun sekitar 3,2% dari bulan sebelumnya.
- Dalam delapan bulan saja, saldo rata-rata sudah menyusut sekitar 4,5% dari posisi akhir tahun lalu, hampir menyamai kontraksi satu tahun penuh pada tahun-tahun sebelumnya. Laju ini menunjukkan bahwa ruang untuk menabung makin sempit, dan dana darurat yang tersisa semakin tipis ketika harga atau kebutuhan mendadak naik.

Sumber: LPS, 2026 (diolah)

Waspadai Rambatan Harga Pedagang Besar ke Konsumen

Inflasi IHPB dan IHK, Des 2025 – Sep 2026 (yoy)

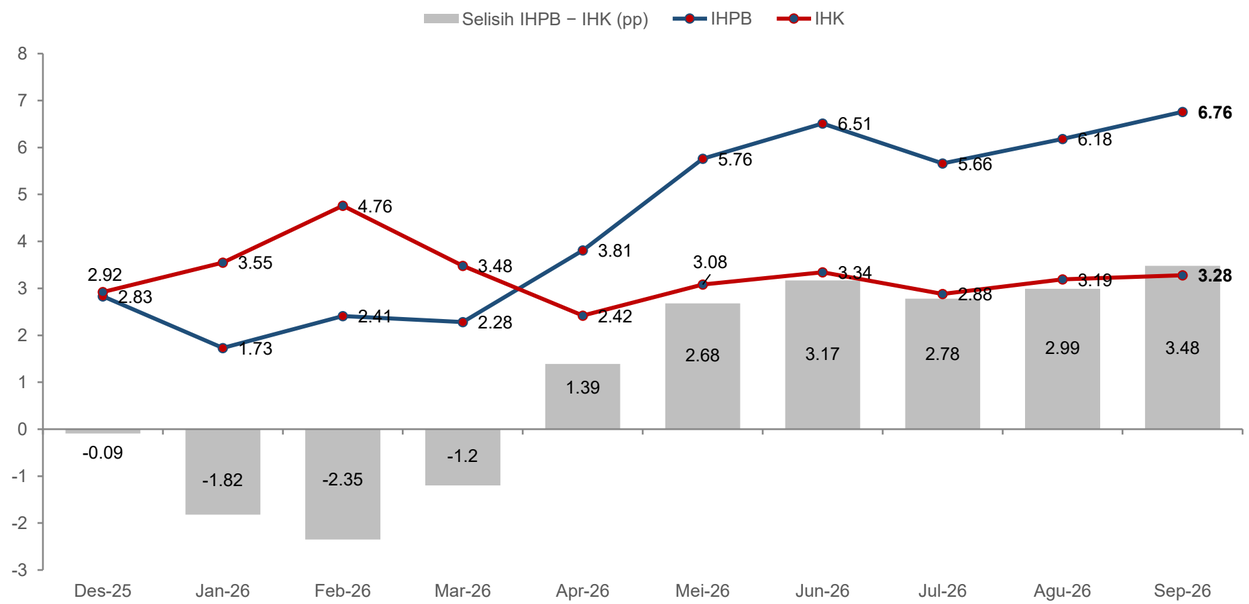

Pertumbuhan Harga Pedagang Besar Komoditas Pokok, Jan – Sep 2026 (yoy)

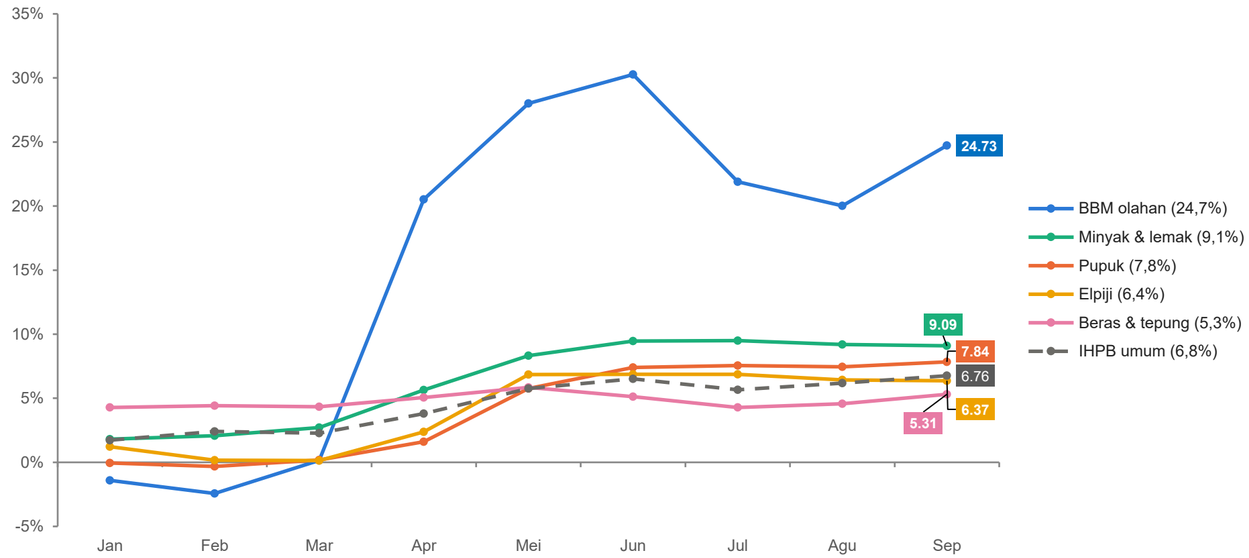

- Biaya di tingkat pedagang besar naik jauh lebih cepat dari harga konsumen. Sejak April 2026, inflasi IHPB melampaui IHK, dan selisihnya melebar hingga 3,48 poin persen pada September (IHPB 6,76% vs IHK 3,28%), mengindikasikan sebagian kenaikan biaya masih tertahan di produsen dan pedagang, belum diteruskan ke konsumen.
- Pendorong utamanya adalah energi. Harga pedagang besar BBM olahan melonjak sejak April seiring lonjakan harga minyak dunia, hingga mencapai 24,7% yoy pada September, atau sekitar 3,7 kali IHPB umum. Kenaikan ini disertai minyak & lemak (9,1%) dan pupuk (7,8%), yang ikut naik sejak April dan bertahan di atas IHPB umum hingga September.
- Sementara itu, elpiji (6,4%) serta beras & tepung (5,3%) bergerak sedikit di bawah IHPB umum dengan pola yang lebih stabil. Meski demikian, biaya energi dan pupuk yang terus menumpuk membuat risiko kenaikan harga konsumen pada bulan-bulan berikutnya masih terbuka, terutama bila tekanan energi berlanjut.

Sumber: BPS (2026)

Klaim Semu Tingkat Pengangguran Terendah dan Tanda Tanya dalam Pengukuran Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka 2016 – Mei 2026 (%)

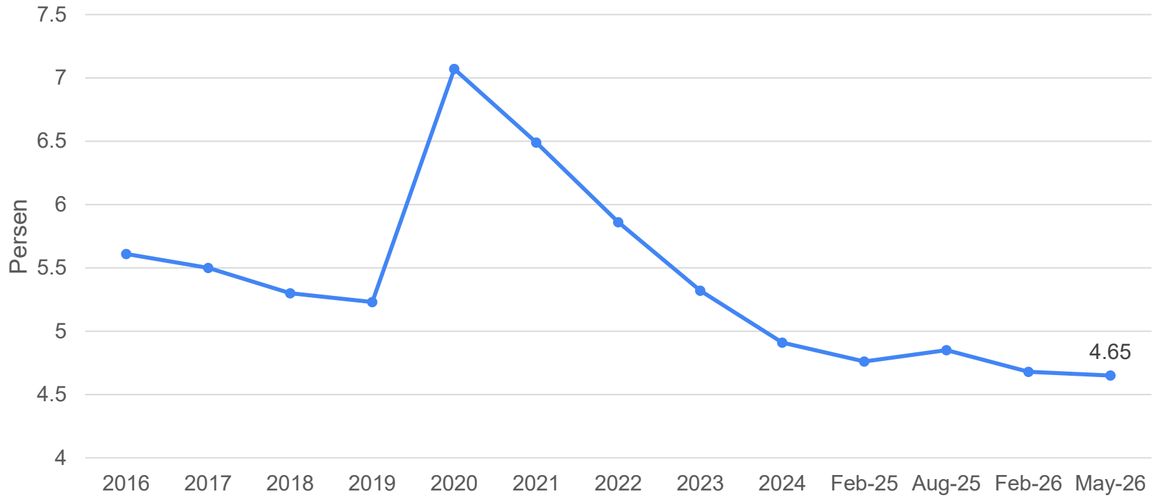

Postur Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Mei 2026 (%)

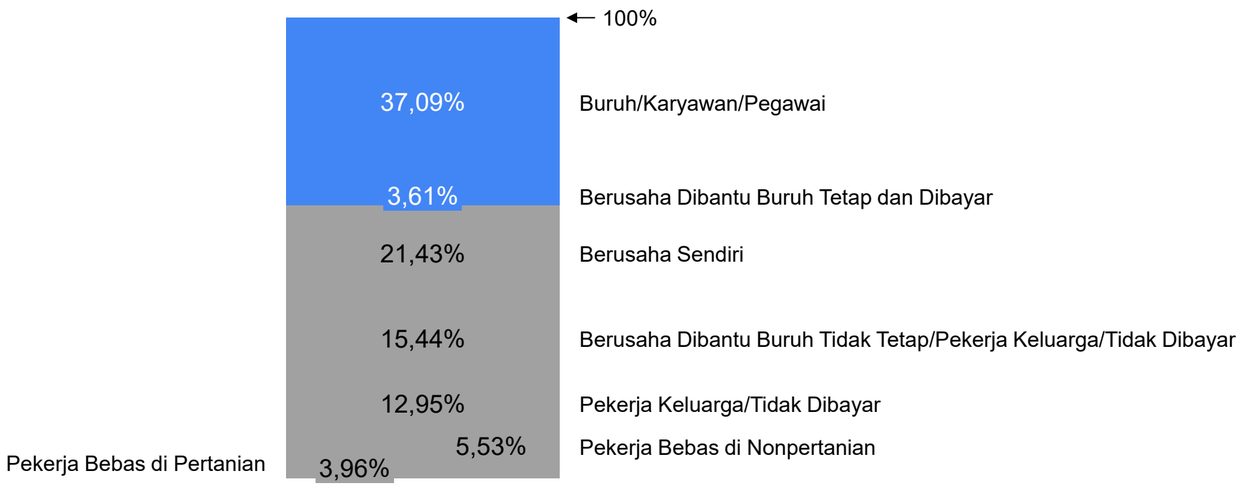

Proporsi Pekerja Formal dan Informal (Persen)

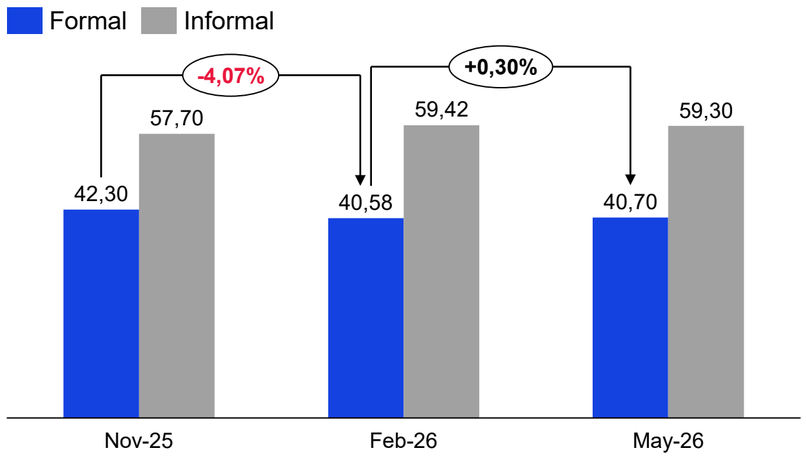

- Klaim tingkat pengangguran terbuka terendah sejak 1994 di level 4,65% tampak semu bila dibaca bersama postur pencatatan penduduk bekerja. Hanya sekitar 37% yang berstatus buruh atau karyawan, ditambah 3,61% yang berusaha dibantu buruh tetap. Sisanya diisi oleh para pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja keluarga atau tidak dibayar, dan pekerja bebas. Padahal status-status ini mencakup orang yang bekerja dengan penghasilan tidak tetap, tanpa kontrak, dan minim jaminan sosial, bahkan tanpa upah sama sekali pada pekerja keluarga.
- Karena standar pengukuran menghitung siapa pun yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu, mereka tetap tercatat sebagai bekerja. Artinya, pencatatan penduduk bekerja ini belum dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat, dan indikator tersebut perlu dipertanyakan relevansinya sebagai ukuran utama kesehatan pasar kerja.
- Kualitas pekerjaan menguatkan pembacaan itu. Porsi pekerja formal turun dari 42,30% pada November 2025 menjadi 40,58% pada Februari 2026, lalu hanya pulih tipis ke 40,70% pada Mei 2026, sehingga hampir 6 dari 10 pekerja masih berada di sektor informal yang umumnya tanpa kepastian pendapatan dan jaminan sosial.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Update Kebijakan Fiskal

Harga Naik, Penerimaan PPN Ikut Naik?

Target Inflasi APBN 2026
2,5% (*yoy*)

Realisasi Inflasi Per September 2026
3,28% (*yoy*)

- Inflasi September 2026 mencapai 0,78 percentage point di atas target inflasi APBN sebesar 2,5%. Kondisi ini meningkatkan risiko tekanan biaya hidup dan memengaruhi daya beli masyarakat.
- Kenaikan harga dapat meningkatkan penerimaan PPN secara nominal, tetapi belum tentu mencerminkan penguatan konsumsi. Ketika harga barang meningkat, nilai transaksi yang menjadi basis pengenaan PPN berpotensi meningkat.

Realisasi Kumulatif PPN & PPNBm, Jan-Jun 2026 (dalam triliun Rupiah)

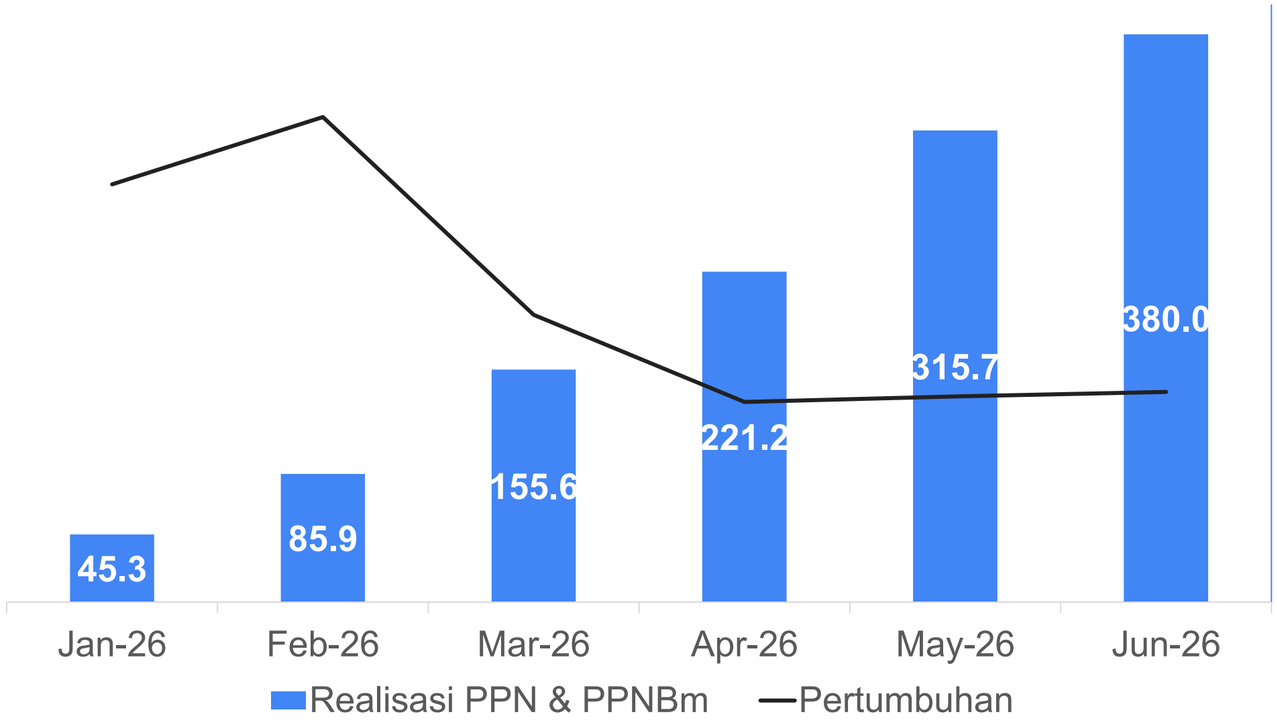

- Pada konteks PPN Impor, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan nilai rupiah atas transaksi impor yang menjadi basis pengenaan pajak. Namun, kenaikan biaya impor juga dapat meningkatkan biaya produksi dan harga domestik, sehingga berpotensi menekan aktivitas produksi maupun konsumsi.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026 (diolah)

Subsidi Energi Menopang Daya Beli, Seberapa Besar Beban APBN?

Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi (dalam triliun Rupiah)

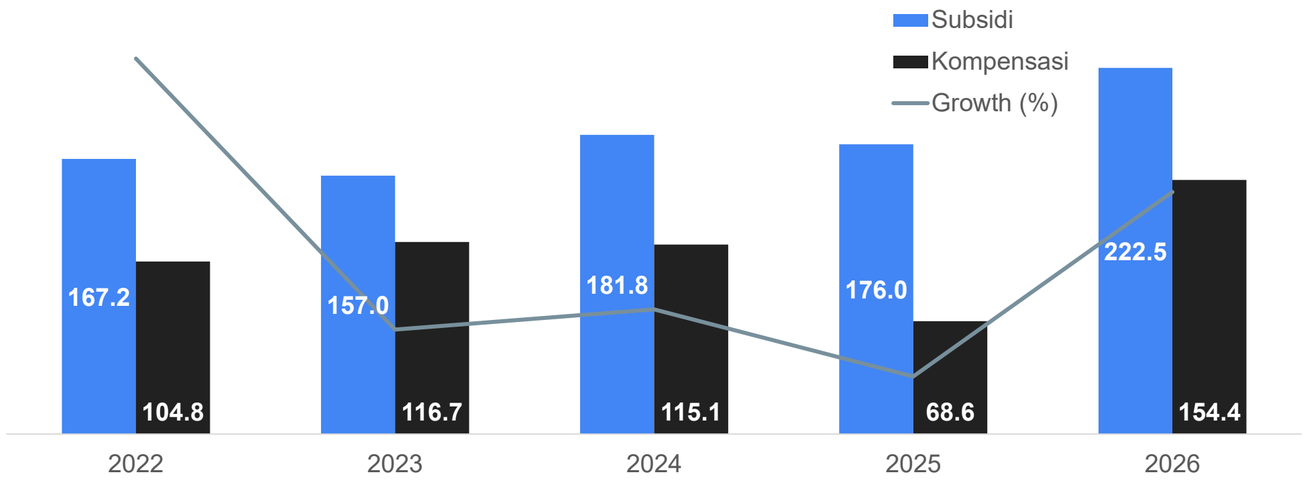

Distribusi Manfaat Subsidi Energi (%)

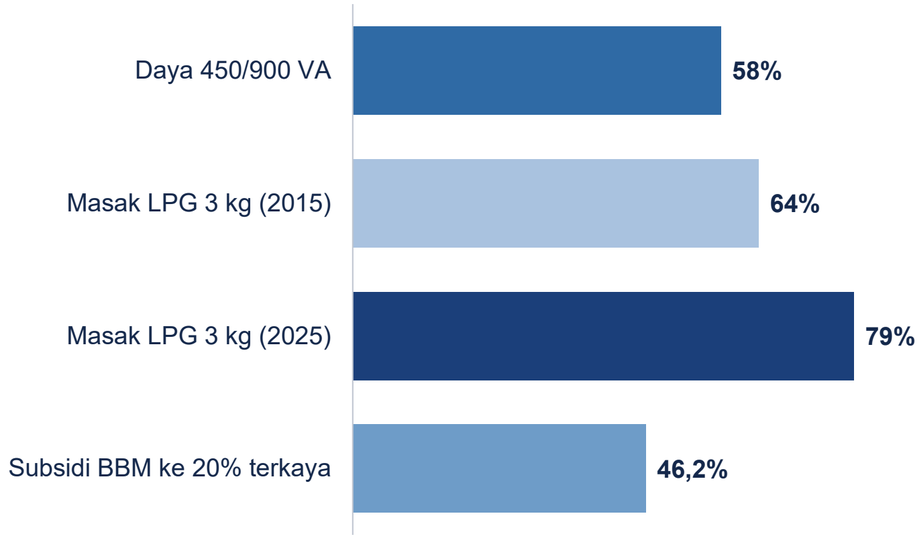

- **Beban fiskal meningkat:** APBN tetap berperan sebagai *shock absorber* dalam menjaga keterjangkauan energi. Realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,9 triliun hingga September 2026 atau 84,3% dari pagu, menunjukkan besarnya eksposur fiskal terhadap dinamika harga energi dan volume konsumsi.
- Permasalahan subsidi energi tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada distribusi manfaatnya. Pada BBM, sebesar 46,2% manfaat subsidi dinikmati oleh 20% kelompok penduduk terkaya. Sementara itu, indikator pemanfaatan subsidi listrik 450/900 VA dan LPG 3 kg juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap basis penerima manfaat
- Ketika subsidi masih melekat pada komoditas, sebagian manfaat berpotensi mengalir kepada kelompok masyarakat yang tidak menjadi prioritas perlindungan
- Oleh karena itu, reformasi subsidi perlu diarahkan pada mekanisme penyaluran yang lebih berbasis penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga serta menjaga keterjangkauan energi bagi kelompok miskin dan rentan.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026 (diolah)

Daya Beli Tertekan, Bansos Bisa Jadi Bantalan?

Realisasi Belanja Bansos 2025 vs 2026 (dalam triliun Rupiah)

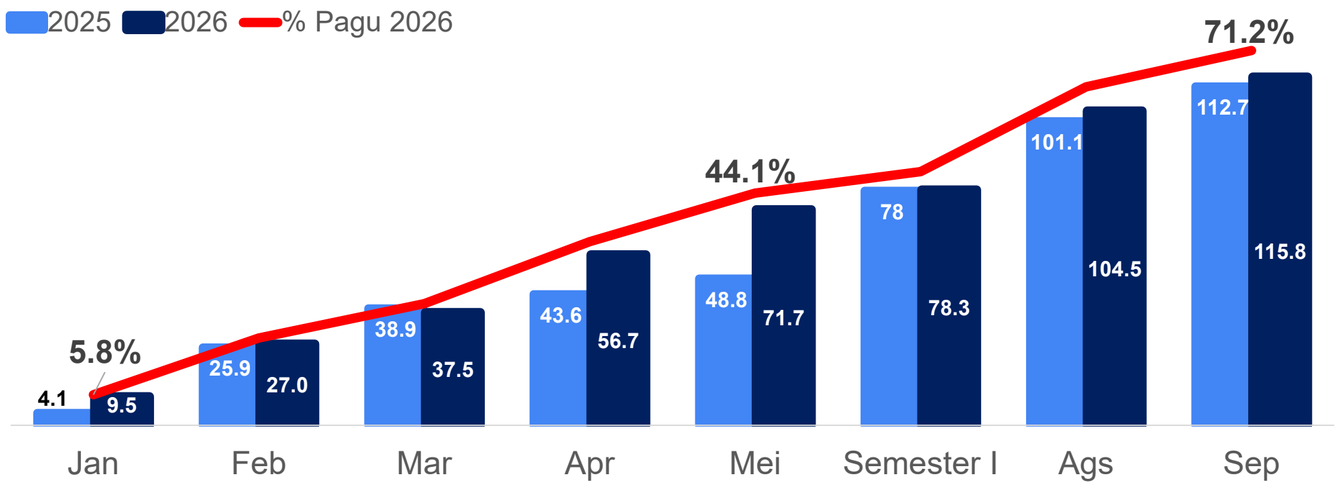

- Realisasi bansos yang mencapai Rp115,8 triliun mengambil proporsi hingga 71,2% dari pagu anggaran bansos 2026. Pada tahun 2026, belanja bansos mengalami akselerasi di awal tahun, lalu kembali moderat memasuki semester II.
- Efektivitas bansos perlu dinilai secara riil, bukan hanya nominal saja. Dengan inflasi pangan mencapai 5,03% yoy (September 2026), maka evaluasi perlu memperhatikan pada nilai, timing, dan targeting bantuan yang benar-benar mampu menjaga daya beli kelompok rentan

Protection gap bagi kelas menengah

Bansos dirancang sebagai *social protection* untuk kelompok miskin dan rentan. Sementara itu, rumah tangga kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli tidak otomatis masuk dalam cakupan bansos.

Tekanan inflasi berpotensi menggerus daya beli

Bagi rumah tangga dengan ruang fiskal terbatas, kenaikan harga kebutuhan dasar dapat mendorong penyesuaian konsumsi, seperti *downtrading,* memunda pembelian, atau mengurangi frekuensi konsumsi.

81% (BPS, 2024)

Konsumsi rumah tangga berasal dari kelas menengah & aspiring middle class.

Ketika kelompok ini menahan konsumsi, dampaknya dapat merembet ke pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sumber: Kementerian Keuangan & BPS, 2026 (diolah)

Bantuan Pangan Diperluas untuk Menjaga Daya Beli di Tengah Tekanan Inflasi

Perbandingan Penyaluran Bantuan Pangan 2025 & 2026 (dalam triliun Rupiah)

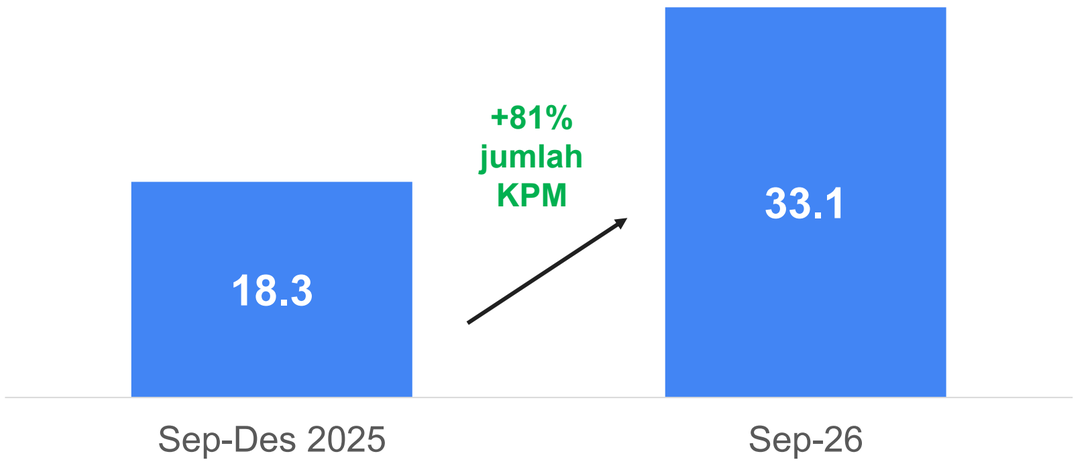

Rp13,1 T

Realisasi anggaran bantuan pangan tahap I hingga September 2026

33,1 Jt

KPM Penerima

Setiap penerima memperoleh alokasi beras dengan total 30kg untuk 3 bulan periode penyaluran

- Penyaluran sembako dan bantuan pangan beras berperan dalam menjaga akses rumah tangga rentan terhadap kebutuhan pangan pokok
- Kenaikan inflasi *volatile food* dari 4,06% (Agustus) menjadi 5,03% (September 2026) memperkuat urgensi intervensi, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
- Namun, efektivitas nya tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kecukupan volume bantuan, serta ketepatan waktu penyaluran

Sumber: Badan Pangan Nasional (2026)

Menopang Daya Beli Pekerja: Seberapa Efektif Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

Indikator	BSU 2025 (Jun-Jul)	BSU 2026 (Okt-Des)
Target Penerima	~17 juta pekerja	13,3 juta pekerja
Bantuan per bulan	Rp300 ribu	Rp300 ribu
Periode	2 bulan	3 bulan
Total/Penerima	Rp600 ribu	Rp900 ribu
Kebutuhan Anggaran	Rp10,72 triliun	~Rp12 triliun

BSU tahun 2025 secara ril tersalurkan kepada 13,1 juta pekerja

- Dengan sasaran hingga 13,3 juta pekerja, BSU dirancang sebagai stimulus yang lebih targeted dibandingkan stimulus konsumsi yang bersifat luas. Namun, cakupan penerima bergantung pada kriteria dan status pekerjaan yang ditetapkan pemerintah.
- BSU Rp900 ribu per penerima berpotensi menjadi *cash buffer* jangka pendek bagi pekerja berpendapatan rendah di tengah tekanan biaya hidup. Namun, dampak terhadap daya beli riil bergantung pada seberapa besar bantuan tersebut dibandingkan kenaikan pengeluaran rumah tangga.
- BSU dapat berfungsi sebagai *shock absorber* jangka pendek, tetapi bukan substitusi bagi penguatan pendapatan yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, penciptaan pekerjaan berkualitas dan penguatan perlindungan pekerja menjadi kunci untuk menjaga ketahanan kelas menengah.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2025 & 2026)

Menopang Daya Beli Rumah Tangga: Bagaimana Indonesia dan Singapura Memberikan Perlindungan?

Fungsi Perlindungan	Indonesia	Singapura
Bantuan Rumah Tangga dan Pangan	PKH, Program Sembako, BLT, dan bantuan lainnya	Assurance Package (bantuan tunai), CDC Vouchers, ComCare untuk rumah tangga berpendapatan rendah
Dukungan Pendapatan Kerja	BSU sebagai bantuan tunai temporer bagi pekerja yang memenuhi kriteria	Workfare Income Supplement (WSI), tambahan pendapatan dan tabungan Central Provident Fund (CPF) bagi pekerja berpendapatan rendah
Mengurangi Biaya Energi dan Utilitas	Subsidi dan kompensasi BBM, LPG 3KG, dan listrik	GST Vouchers, U-Save berupa pengurangan tagihan utilitias bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria

Implikasi untuk Indonesia:

- Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa perlindungan daya beli perlu diperkuat melalui kombinasi bantuan tunai, dukungan pekerja, dan pengurangan biaya utilitas, terutama untuk kelompok rentan. Tantangannya bukan hanya memperbesar alokasi anggaran, tetapi memastikan setiap instrumen menjangkau kelompok yang tepat serta memberikan perlindungan yang memadai dan berkelanjutan.
- Bagi Indonesia, tantangannya adalah memperkuat keterpaduan antar-instrumen agar perlindungan tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.

Sumber: Kemensos RI, Kemnaker RI, GovBenefits Singapore, CPF Board, Ministry of Manpower Singapore, MOF Singapore (2026), diolah

Daftar Pustaka

- Badan Pangan Nasional. (2026a, 14 April). Harga kedelai terkendali, distributor dan importir harus patuhi harga acuan [Siaran pers]. https://badanpangan.go.id/blog/post/harga-kedelai-terkendali-distributor-dan-importir-harus-patuhi-harga-acuan
- Badan Pangan Nasional. (2026b, 17 April). Bapanas pastikan ketersediaan stok kedelai mencukupi, kewajaran harga di tingkat perajin tahu tempe dijaga [Siaran pers]. https://badanpangan.go.id/blog/post/bapanas-pastikan-ketersediaan-stok-kedelai-mencukupi-kewajaran-harga-di-tingkat-perajin-tahu-tempe-dijaga
- Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Mei). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026 [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/169891/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-68-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html
- Badan Pusat Statistik. (2026b, 5 Agustus). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026 [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/169926/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-65-persen---rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-39-juta-rupiah-.html
- Badan Pusat Statistik. (2026c). [Seri 2010] 3. Distribusi PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku (persen) [Tabel statistik]. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTEwIzI=/-seri-2010--3--distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran--persen-.html
- Badan Pusat Statistik. (2026d). [Seri 2010] 4. Laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran (persen) [Tabel statistik]. Diakses 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4IzI=/-seri-2010--4--laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran--persen-.html
- Badan Pusat Statistik. (2026e). Perkembangan indeks harga perdagangan besar, Desember 2025–Agustus 2026 [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease?keyword=perdagangan%20besar
- Badan Pusat Statistik. (2026f, 1 Oktober). Perkembangan indeks harga konsumen September 2026 (No. 94/10/Th. XXIX) [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/10/01/2623/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-september-2026-sebesar-3-28-persen-.html

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2026g, 1 Oktober). Perkembangan indeks harga perdagangan besar September 2026 (No. 95/10/Th. XXIX) [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/10/01/2622/pada-september-2026--perubahan-indeks-harga-perdaganganbesar--ihpb--umum-nasional-tahun-ke-tahun-sebesar-6-76-persen.html
- Badan Pusat Statistik. (2026h). Indeks harga perdagangan besar (IHPB) seksi barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin dan perlengkapannya (2023=100), 2025–2026 [Tabel statistik]. Diakses 23 dan 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwMCMy/x.html
- Badan Pusat Statistik. (2026i). Indeks harga perdagangan besar (IHPB) seksi produk makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian dan produk kulit (2023=100), 2025–2026 [Tabel statistik]. Diakses 23 dan 26 Oktober 2026, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ5NyMy/indeks-harga-perdagangan-besar--ihpb--seksi-produk-makanan.html
- Bank Indonesia. (n.d.-a). Informasi kurs transaksi BI [Tabel statistik]. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx
- Bank Indonesia. (n.d.-b). Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional: Tabel harga produsen komoditas [Tabel statistik]. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://www.bi.go.id/hargapangan/TabelHarga/ProdusenKomoditas
- Bank Indonesia. (n.d.-c). BI-Rate [Tabel statistik]. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-rate.aspx
- Bank Indonesia. (n.d.-d). Kurs JISDOR [Tabel statistik]. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/default.aspx
- CEIC Data. (2026a). Crude oil: United States: Brent [Data set]. U.S. Energy Information Administration.
- CEIC Data. (2026b). Growth of Retail Sales Index [Data set]. Bank Indonesia.
- CEIC Data. (2026c). Indonesia banking survey: Lending standard index: By type of credit: Other consumer [Data set]. Bank Indonesia.
- CEIC Data. (2026d). Indonesia: Import value [Data set]. Badan Pusat Statistik.

Daftar Pustaka

- Central Provident Fund Board Singapore. (2026). CPF Overview. https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview
- Chia, Ngee Choon. (2010). Social Protection in Singapore: Targeted Welfare and Asset-based Social Security, dalam ERIA Research Project Report No. 9.
- CNBC Indonesia. (2026, 19 September). Berlaku 19 September 2026, daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU RI. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260919065449-4-769178/berlaku-19-september-2026-daftar-lengkap-harga-bbm-di-seluruh-spbu-ri
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). FAO food price index [Data set]. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (n.d.). Harga minyak mentah. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://migas.esdm.go.id/post/harga-minyak-mentah
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, 12 Oktober). Tensi geopolitik memanas, ICP September 2026 melonjak ke angka US$112,81 per barel [Siaran pers]. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. https://migas.esdm.go.id/post/Tensi-Geopolitik-Memanas-ICP-September-2026-Melonjak-ke-Angka-US-112-81-per-Barel
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN KiTa. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026). Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP): Harga nasional tertimbang dan harga provinsi [Data set]. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://sp2kp.kemendag.go.id/
- Lembaga Penjamin Simpanan. (n.d.). Distribusi Penyaluran Simpanan.
- Ministry of Finance Singapore. (2025). Fiscal Overview. https://www.mof.gov.sg/policies/fiscal/overview/#f952186749809ac42cd92658f803d6d5
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). National currency to US dollar exchange rate: Average of daily rates for Indonesia [Data set]. Federal Reserve Bank of St. Louis. Diakses 30 Oktober 2026, dari https://fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02IDM618N
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. https://peraturan.go.id/files/uu-no-17-tahun-2025.pdf

INDEF

Tentang Center MACFIN-INDEF

Center of Macroeconomics and Finance **(MacFin)** merupakan pusat kajian di bawah **Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)** yang berfokus pada analisis isu-isu makroekonomi dan keuangan publik Indonesia.

Melalui publikasi riset, *policy brief*, diskusi publik, dan advokasi kebijakan, MacFin berkontribusi dalam memperkaya perdebatan kebijakan ekonomi nasional serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

INDEF | Institute for Development of Economics and Finance

Terima Kasih

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)